



RENJA 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Merangin dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Rencana Kerja DISKOMINFO ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, dan mengacu kepada RKPD Kab. Merangin tahun 2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen DISKOMINFO di dalam Mencapai Sasaran Indikator, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

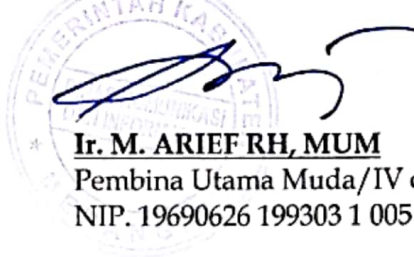
Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk 1 (satu) tahun.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja DISKOMINFO Kabupaten Merangin Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bangko, 20 Desember 2023

KEPALA DINAS



Ir. M. ARIEF RH, MUM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19690626 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	98
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	53
3.3. Program dan Kegiatan	56

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ERANGKAT DAERAH

4.1 Indikator Kinerja 72
4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana 72

BAB V. PENUTUP..... 79

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan penjabaran dari rencana jangka menengah pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan RPJMD. Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini berisi program dan kegiatan serta indikator yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka dibuat Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Forum Perangkat Daerah untuk di tindak lanjuti ke tingkat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023, dimana berbagai usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan kebijakan program, pendanaan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 mendatang.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah

menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Rancangan Renja ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2024-2026 Kabupaten Merangin serta memperhatikan Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo. Selain itu Renja ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin menyusun Dokumen Renja.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berperan secara optimal memberikan pelayanan publik di bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat di Kabupaten Merangin.

1.1.1. Pengertian Renja

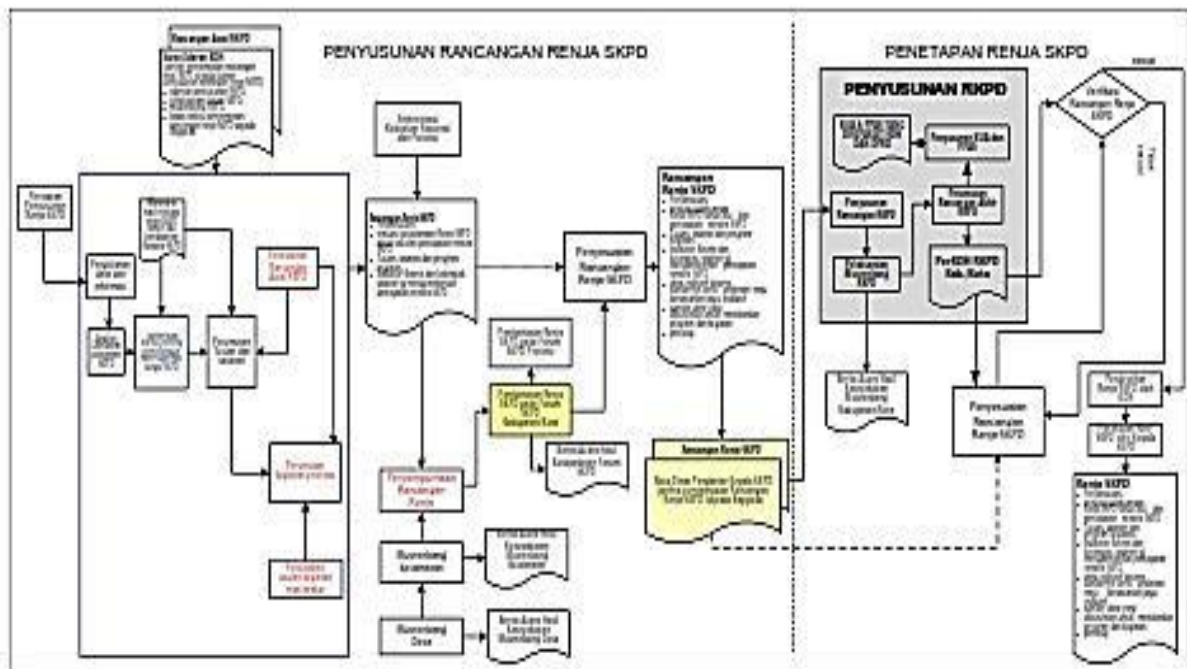
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja DISKOMINFO

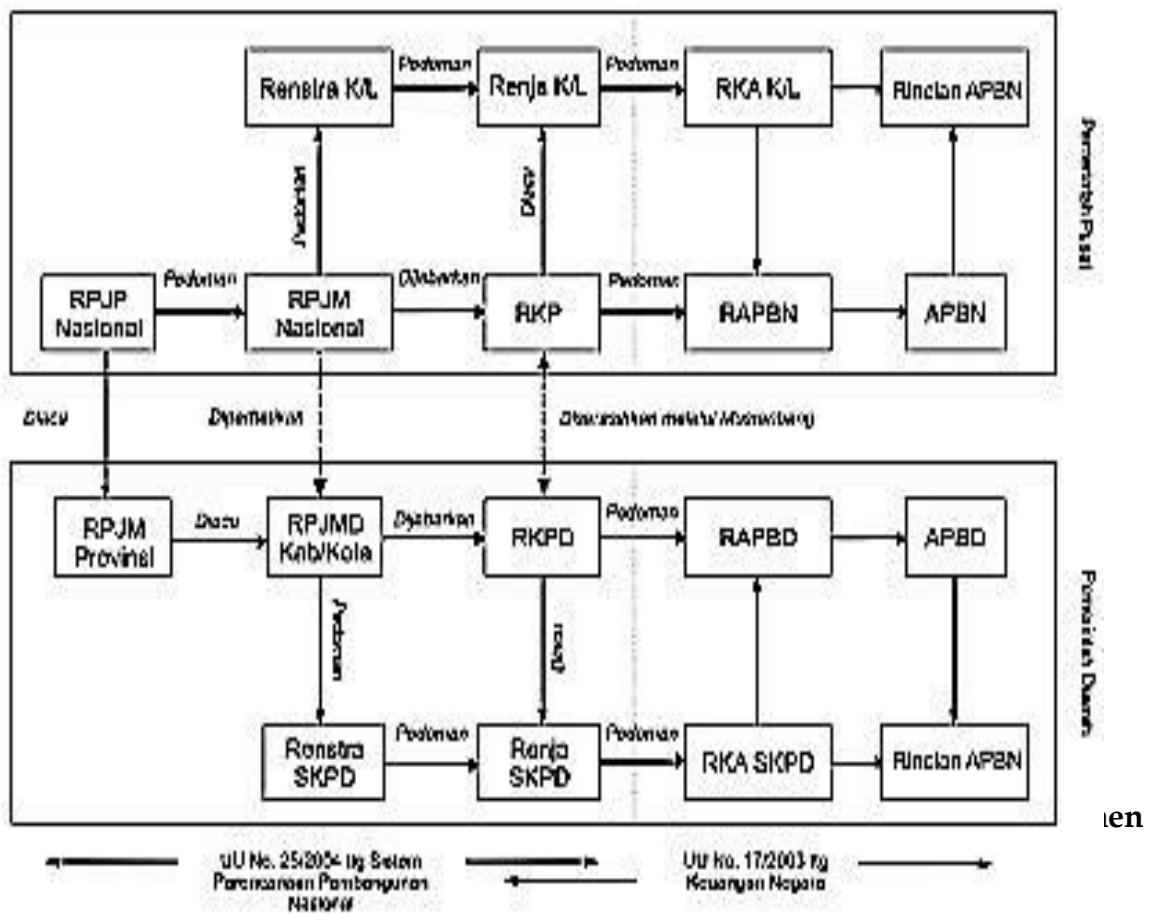
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

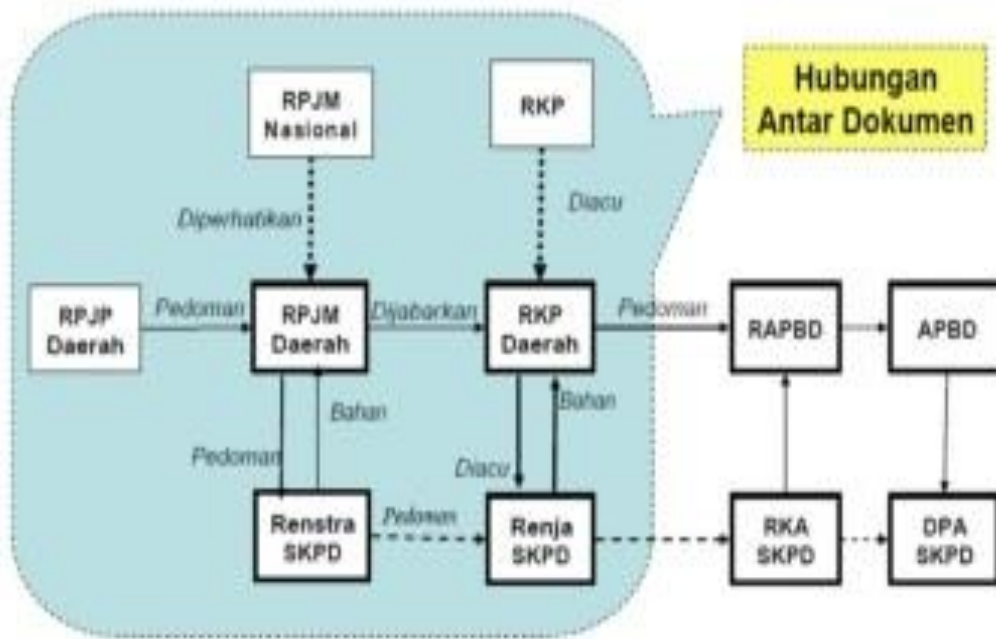
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
 - Penyempurnaan rancangan kerja Perangkat Daerah
 - Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dengan penganggaran dibawah ini :



Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
30. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
32. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 33. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 34. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 35. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 38. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
 39. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03));
41. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);
44. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);
45. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 39);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin selama tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian Mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu Membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.
- Penjelasan Mengenai Alasan Proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: Terdapat Rumusan Program dan Kegiatan Baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau Program dan Kegiatan cocok Namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indilatif, maupun kombinasi keduanya.
- Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikatof Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2022-2=2010) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media KOMunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Faktor-faktor penyebab kurang terpenuhinya target kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) pada Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
 - Data KIM di kecamatan belum valid.
 - Masih ada kecamatan yang belum memiliki KIM.Dengan tidak terlaksananya kegiatan ini tentunya akan berpengaruh pada hasil dari target kegiatan dan program yang telah direncanakan sebelumnya.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Statistik Sektoral.
 - Sulitnya proses pengumpulan data Statistik Sektoral.
 - Terbatas sarana dan prasarana pelaksanaan Statistik Sektoral.
4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mengatasi faktor-faktor penyebab diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM melalui :
 - a. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada setiap desa di kabupaten Merangin.
 - b. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada setiap kecamatan di kabupaten Merangin.
 - c. Sosialisasi tentang tugas dan fungsi serta manfaat KIM.
 - d. Melakukan pembinaan rutin terhadap KIM yang sudah terbentuk.
 - e. Memberikan bantuan dana kegiatan untuk KIM kecamatan.
 - f. Pemanfaatan KIM sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.
 - g. Melaksanakan lomba KIM antar kecamatan.
2. Pelaksanaan Statistik Sektoral, melalui :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan statistik sektoral.
 - b. Melakukan sosialisasi statistik sektoral kepada semua perangkat daerah.
 - c. Penyiapan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan statistik daerah.
 - d. Melakukan kerjasama yang baik dengan Badan Pusat Statistik kabupaten, propinsi maupun pusat.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin melalui Diklat Teknis, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional serta Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.
2. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika.

3. Meningkatkan sinergitas dan integritas kelembagaan komunikasi dan informatika.
4. Menyediakan Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Sistem Aplikasi Pelayanan Publik.
5. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam menunjang tugas pemerintah.

Untuk melihat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tampak pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Merangin

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<u>TAHUN ANGGARAN 2021</u>										
2.10.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi	95 %	96 %	97 %	97 %	97 %	96 %		
2.10.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen, surat yang terselesaikan	250 Surat	250 Surat	250 Surat	250 Surat	100 %	250 Surat	750 Surat	33,33 %
2.10.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	30 %
2.10.1.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya	8 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit	100 %	10 Unit	35 Unit	22,8 %
2.10.1.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	33,33 %
2.10.1.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	33,33 %
2.10.1.01.06	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran	-	22 Orang	12 Bulan	12 Bulan	100 %	22 Orang	-	-
2.10.1.01.07	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa iuran kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	-	0 Orang	23 Orang	23 Orang	100 %	0 Orang	23 Orang	-
2.10.1.01.09	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	-
2.10.1.01.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan	8 Eks	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100 %	15 Jenis	45 Jenis	17,77 %
2.10.1.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	8 Jenis	10 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100 %	10 Jenis	35 Unit	17,77 %
2.10.1.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	-	6 Media Massa	6 Media Massa	6 Media Massa	100 %	6 Media Massa	18 Media Massa	33,33 %

2.10.1.01.1 3	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Pasien/ Tamu	-	11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan	100 %	11 Bulan	33 Bulan	33,33 %
2.10.1.01.1 4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	-	45 Kali	45 Kali	45 Kali	100 %	45 Kali	135 Kali	33,33 %
2.10.1.01.1 5	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	-	50 Kali	52 Kali	52 Kali	100 %	50 Kali	152 Kali	32,89 %
2.10.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	90 %	92 %	93 %	93 %	93 %	92 %		
2.10.1.02.0 4	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	100 %	-	2 Unit	-
2.10.1.02.0 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	-	1 Unit	1 Unit	100 %	-	1 Unit	-
2.10.1.02.0 8	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	33,33 %
2.10.1.02.1 1	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	11 Unit	15 Unit	50 Unit	50 Unit	100 %	15 Unit	80 Unit	18,75 %
2.10.1.02.1 2	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	-	2 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	2 Unit	14 Unit	14,28 %
2.10.1.02.1 4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	100 %	-	1 Unit	-
2.10.1.02.1 5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %	2 Unit	8 Unit	25 %
2.10.1.02.1 6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-	8 Unit	9 Unit	9 Unit	100 %	8 Unit	25 Unit	32 %
2.10.1.02.1 8	Rehabilitasi Sedang/berat gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang diadakan	-	-	1 Unit	1 Unit	100 %	-	1 Unit	-
2.10.1.02.2 0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	13 Unit	14 Unit	14 Unit	100 %	13 Unit	40 Unit	-
2.10.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan		95 %	96 %	96 %	96 %	95 %		
2.10.1.03.0 1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	-	31 Stel	60 Stel	60 Stel	100 %	31 Stel	122 Stel	-
2.10.1.03.0 2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	-	-	31 Stel	31 Stel	100 %	-	31 Stel	-
2.10.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara		41 %	45 %	45 %	45 %	41 %		

		(ASN)								
2.10.1.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan-Undangan	-	-	10 Orang	10 Orang	100 %	-	10 Orang	-
2.10.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional	-	5 Orang	8 Orang	8 Orang	100 %	5 Orang	18 Orang	-
2.10.1.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP/LAKIP		BB	75,70 %	75,70 %	75,70 %	BB		
2.10.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	50 %
2.10.1.11	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Pengembangan Pelayanan Publik dengan e-Planning			96 %	96 %	96 %			
2.10.1.11.01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD	Tersedianya dokumen Rencana Kerja SKPD selama 5 Tahun	8 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	1 Dok	4 Dok	50 %
2.10.1.11.02	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	6 Dok	33,33 %
2.10.1.11.03	Penyusunan Rencana Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	6 Dok	33,33 %
02.10.1.20	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik		10 %	70 %	70 %	70 %	10 %		
02.10.1.20.01	Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	5 KIM	4 KIM	5 KIM	5 KIM	100 %	4 KIM	13 KIM	38,46 %
02.10.1.20.02	Pengendalian dan Pengawasan Media Informasi Publik dan Penyiaran	Jumlah Media Informasi Publik dan Penyiaran yang diawasi	-	4 Kali	-	-	-	4 Kali	8 Kali	-
02.10.1.20.03	Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi	Jumlah Menara yang diawasi	132 Unit	131 Unit	135 Unit	135 Unit	135 Unit	131 Unit	131 Unit	99,24 %
02.10.1.20.04	Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE	Jumlah LPSE yang dikelola dan dikembangkan	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-
02.10.1.20.05	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet	Jumlah Warnet yang diawasi	-	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100 %	25 Unit	25 Unit	-
02.10.1.20.06	Penyelenggaraan dan Invoasi Pembangunan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Daerah	-	1 Kali	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-
02.10.1.20.07	Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola	Tersedianya Layanan Pejabat Pengelola	-	4 Kali	-	-	-	4 Kali	4 Kali	-

	Informasi dan Dokumentasi	Informasi Daerah (PPID)								
02.10.1.20.08	Fasilitasi dan Kerjasama Penyiaran Radio Publik	Fasilitasi dan Kerjasama Penyiaran dan Radio Publik yang dipelihara								
02.10.1.20.09	Pengelolaan Layanan Media Center	Terciptanya Layanan Media Center dan Media Center Temporary Kab. Merangin								
02.10.1.20.10	Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK	Jumlah Infrastruktur Jaringan Internet Untuk Masyarakat yang dibangun								
02.10.1.20.11	Pembangunan dan Pengelolaan Smart City	Terlaksananya Operasional Jaringan Internet Untuk Masyarakat								
02.10.1.20.12	Pembuatan dan Pengelolaan Informasi, Website, dan Aplikasi Layanan Pengaduan Online	Jumlah Website dan Sistem Pengaduan Online yang dibangun	-	1 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1 Unit	1 Unit	
02.10.1.20.13	Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi terintegrasi yang dibangun	-	1 Unit	-	-		1 Unit	1 Unit	
02.10.1.20.14	Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Terlaksananya Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	-	12 Kali	-	-		12 Kali	12 Kali	
02.10.1.22	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dan Persandian	Terlaksananya Operasional Sistem Integrator Antar Sistem Informasi SKPD					10 %			
02.10.1.22.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik yang diolah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<u>TAHUN ANGGARAN 2022</u>										
2.10.2.10.1 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			97 %	97 %				
2.10.2.10.1 .01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terselesaikan	250 Surat	250 Surat	250 Surat	250 Surat		250 Surat		
2.10.2.10.1 .01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
2.10.2.10.1 .01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya	8 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit		10 Unit		
2.10.2.10.1 .01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
2.10.2.10.1 .01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
2.10.2.10.1 .01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
2.10.2.10.1 .01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Eks	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis		
2.10.2.10.1 .01.12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis		10 Jenis		
2.10.2.10.1 .01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi	Jumlah Bacaan dan Publikasi yang disediakan		6 Media Massa	6 Media Massa	6 Media Massa		6 Media Massa		
2.10.2.10.1 .01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Makan dan Minum harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang disediakan		11 Bulan	11 Bulan	11 Bulan		11 Bulan		
2.10.2.10.1 .01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		45 Kali	45 Kali	45 Kali		45 Kali		
2.10.2.10.1 .01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran		22 Orang	23 Orang	23 Orang		22 Orang		

2.10.2.10.1 .01.20	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah yang dilaksanakan		50 Kali	52 Kali	52 Kali		50 Kali		
2.10.2.10.1 .01.25	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS		0 Orang	23 Orang	23 Orang		0 Orang		
2.10.2.10.1 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			93 %	93 %				
2.10.2.10.1 .02.04	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan			2 Unit	2 Unit				
XX.XX.02. 04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang diadakan			1 Unit	1 Unit				
2.10.2.10.1 .02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit				
2.10.2.10.1 .02.07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja yang diadakan	30 Unit		1 Unit	1 Unit				
2.10.2.10.1 .02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	11 Unit	15 Unit	50 Unit	50 Unit		15 Unit		
2.10.2.10.1 .02.11	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan		2 Unit	10 Unit	10 Unit		2 Unit		
2.10.2.10.1 .02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 Unit	1 Unit				
2.10.2.10.1 .02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		2 Unit	4 Unit	4 Unit		2 Unit		
2.10.2.10.1 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		8 Unit	9 Unit	9 Unit		8 Unit		
2.10.2.10.1 .02.26	Pemeliharaan Rutun/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Kerja	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang dipelihara		13 Unit	14 Unit	14 Unit		13 Unit		
2.10.2.10.1 .02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara			1 Unit	1 Unit				
2.10.2.10.1 .03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana			96 %	96 %				
2.10.2.10.1 .03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan		31 Stel	60 Stel	60 Stel		31 Stel		
2.10.2.10.1 .03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan			31 Stel	31 Stel				
2.10.2.10.1 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan			45 %	45 %				
2.10.2.10.1 .05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			10 Orang	10 Orang				

2.10.2.10.1.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan			10 Orang	10 Orang				
2.10.2.10.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		5 Orang	8 Orang	8 Orang		5 Orang		
2.10.2.10.1.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			75,70 %	75,70 %				
2.10.2.10.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun	6 Dok	1 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dok		
2.10.2.10.1.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun	1 Dok	2 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dok		
2.10.2.10.1.06.005	Penyusunan Laporan Tahunan OPD	Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun	1 Dok	2 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen		2 Dok		
2.10.2.10.1.11	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Renstra terhadap Renja			96 %	96 %				
2.10.2.10.1.11.02	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun	8 Dok		2 Dokumen	2 Dokumen				
2.10.2.10.1.11.04	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	2 Dok		2 Dokumen	2 Dokumen				
2.10.2.10.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi Publik			70 %	70 %				
2.10.2.10.1.23.01	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah			1 Dok	1 Dok				
2.10.2.10.1.23.02	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dibangun		1 Unit	6 Unit	6 Unit		1 Unit		
2.10.2.10.1.23.03	Pembinaan dan Pendampingan Forum Kim (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina	5 KIM		5 KIM	5 KIM				
2.10.2.10.1.23.04	Penyebarluasan Informasi Melalui Media	Frekuensi Penyebarluasan Informasi			3 Kali	3 Kali				
2.10.2.10.1.24	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika			10 %	10 %				
2.10.2.10.1.24.01	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK	Jumlah Infrastruktur jaringan dan Peralatan TIK yang dibangun			1 Unit	1 Unit				

2.10.2.10.1 .24.02	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi			4 Sistem Aplikasi	4 Sistem Aplikasi			
2.10.2.10.1 .24.03	Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City	Jumlah Smart City yang dibangun			1 Unit	1 Unit			
2.10.2.10.1 .24.04	Penyelenggaraan Nama Domain dan E-Government (SPBE)	Jumlah system digital yang dibangun			2 Unit	2 Unit			
2.10.2.10.1 .24.05	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet	Jumlah warnet yang dibina		25 Unit	25 Unit	25 Unit		25	
2.10.2.10.1 .24.06	Pengelolaan dan Standarisasi serta Keamanan Layanan LPSE	Jumlah LPSE yang diupdate			1 Unit	1 Unit			
2.10.2.10.1 .24.07	Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi	Jumlah menara yang diawasi			135 Unit	135 Unit			
2.14.2.10.1 .25	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Tersedia			25 %	25 %			
2.14.2.10.1 .25.01	Penyusunan Database Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang disusun			1 Dok	1 Dok			
2.14.2.10.1 .25.02	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan			1 Unit	1 Unit			
2.15.2.10.1 .26	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			10 %	10 %			
2.15.2.10.1 .26.01	Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Jumlah sistem yang dibangun	1 Unit		1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi			
2.15.2.10.1 .26.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Keamanan Informasi	Frekuensi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			4 Kali	4 Kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
TAHUN ANGGARAN 2023										
2.16.01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota									
2.16.01.2.10	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	8 Dok							
2.16.01.2.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	2 Dok							
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2 Dok							
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	6 Dok							
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun							
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrator Keuangan yang disediakan	12 Bulan							
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok							
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD	1 Dok							
2.16.01.2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah									
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Alat Kelengkapan Listrik dan Elektronik Perangkat Daerah yang disediakan	8 Jenis							

	Banguan Kantor								
2.16.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor yang disediakan	30 Unit						
2.16.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah yang disediakan	8 Eks						
2.16.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Perjalanan dinas yang disediakan	99 Kali						
2.16.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.0 7.05	Pengadaan Meubel	Set Meubel Perangkat Daerah yang disediakan	11 Unit						
2.16.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor Perangkat Daeah yang diadakan	2 Unit						
2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Keluar Perangkat Daerah	250 Surat						
2.16.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan						
2.16.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makan dan Minuman Pegawai yang disediakan	64 Orang						
2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara	2 Unit						
2.16.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara	8 Unit						
2.16.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 Unit						
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik								

2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik									
2.16.02.2.0 1.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Internet Sehat	2 Kali							
2.16.02.2.0 1.05	Pengelolaan media Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik yang dikelola	160 Media							
2.16.02.2.0 1.06	Pelayanan Informasi Publik	PPID Pembantu yang dibentuk	56 Unit							
2.16.02.2.0 1.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	5 KIM							
2.16.03	Program Aplikasi Informatika									
2.16.03.2.0 1.12	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kab/Kota									
2.16.03.2.0 2.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Daerah	SPBE yang dikelola	1 Unit							
2.16.03.2.0 2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi yang dikembangkan	2 Aolikasi							
2.16.03.2.0 2.09	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Smart City yang dikelola	1 Unit							
2.16.03.2.0 2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara Telekomunikasi yang diawasi	132 Unit							
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota									
2.20.02.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Statistik Sektoral yang disusun	1 Dok							
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk									

	Pengamanan Informasi									
2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.21.02.2.0 1.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	1	Unit						

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berkewajiban untuk melaksanakan SPM sesuai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 - 2023.

Ditinjau dari segi hukum SPM bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dapat bersifat "*beziking*" yaitu penetapan materi yang telah diatur oleh payung hukum yang lebih tinggi, namun bersifat juga "*regeling*" yaitu pengaturan materi dapat ditambahkan sesuai kemampuan pihak yang mendapat materi pengaturan. SPM bidang komunikasi dan informatika merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kajian diatas terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 30 November 2022 sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

1. Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencapai 100%
2. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi mencapai 99,24%
3. Persentase Pembuatan dan Pengelolaan Informasi, Website, dan Aplikasi Layanan Pengaduan Online mencapai 6 unit

Kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM, sebagai berikut

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :

- Media massa seperti majalah, radio, dan televisi dapat dicapai 12 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
 - Media baru seperti website (media online) dapat dicapai setiap hari dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak setiap hari.
 - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat dapat dicapai 1 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
 - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dapat dicapai 12 kali per tahun per Kecamatan dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun per Kecamatan.
 - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dapat dicapai 4 kali per tahun dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 12 kali per tahun.
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dapat dicapai 25% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 50%.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tampak pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2019(Tahun n-2)	Tahun 2020(Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)	Tahun 2019 (Tahun n-2)	Tahun 2020 (Tahun n-1)	Tahun 2021 (Tahun n)	Tahun 2022 (Tahun n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	100%	-	-	-	98%	-	-	-
2	Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	4 SIM	-	-	-	3 SIM	-	-	-
3	Cakupan Layanan Informasi Publik	-	-	-	149 Desa	-	-	-	147 Desa	-	-
4	Persentase Layanan Komunikasi Publik	-	-	-	-	70%	75%	-	-	70%	75%
5	Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika	-	-	-	-	10%	20%	-	-	10%	20%
6	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian	-	-	-	100%	-	-	-	90%	-	-
7	Persentase Data Sektoral Tersedia	-	-	-	-	25%	35%	-	-	25%	35%
8	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	10%	25%	-	-	10%	25%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :
 - 1) Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 - 2) Permasalahan dibidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

 - Kurangnya ASN yang memiliki kemampuan teknis di bidang Layanan Komunikasi Publik.
 - Masih kurangnya sarana dan prasana penyediaan informasi untuk pelayanan publik.
 - Belum tersedia Sistem Aplikasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien.
 - Belum optimalnya pengelolaan Media Center.
 - Belum optimalnya pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - Belum optimalnya Media Penyiaran Publik seperti Radio.
 - Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat.
 - 3) Permasalahan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beberapa permasalahan, antara lain :

- Kurangnya ASN yang memiliki kemampuan teknis pengelolaan jaringan komputer.
 - Belum tersedianya peralatan jaringan komputer yang memadai.
 - Belum tersedianya Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - Integrasi Sistem Informasi belum tercapai.
 - Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet* belum optimal.
- 4) Permasalahan dibidang Layanan Komunikasi dan Informatika
- Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa permasalahan, antara lain :
- Pengelolaan Website kabupaten belum maksimal.
 - Belum tersedianya Server jaringan yang memadai.
 - Belum optimalnya pengawasan penggunaan peralatan teknologi informasi.
 - Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan E-Government.
 - Kurangnya sarana dan prasana dalam pelaksanaan persandian antar perangkat daerah.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- a. Membantu Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.
 - b. Membantu Pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :
- a. Tantangan
- Adapun tantangan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- Masih Rendahnya Kualitas SDM Penunjang Pelayanan.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan.
- Belum tersedianya Server jaringan yang memadai.
- Belum optimalnya Pengelolaan jaringan *internet* dan *intranet*.
- Belum tersedia Sistem Aplikasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien.
- Belum tersedianya Sistem Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Belum terlaksananya Integrasi Sistem Informasi.
- Belum maksimalnya Pengelolaan Website kabupaten.
- Belum terlaksananya E-Government atau SPBE.
- Belum terlaksananya penggunaan sandi dalam pengiriman data antar perangkat daerah.
- Masih banyak terdapat daerah yang belum terjangkau sinyal (blank spot).

b. Peluang

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik formal maupun non formal.
- Adanya peluang untuk penambahan tenaga teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Adanya peluang penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.
- Adanya kebijakan pemerintah untuk penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di semua daerah.
- Adanya kebijakan pemerintah untuk penerapan pelaksanaan persandian di semua perangkat daerah.
- Tersedianya beberapa Sistem Aplikasi di Kementerian.
- Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi.

- Adanya ketersediaan media informasi dan teknologi untuk didayagunakan.
5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Melalui program ini diharapkan akan memberikan peningkatan persentase layanan komunikasi publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan efisien.
 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Melalui program ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menyediakan berbagai jenis sistem aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga semua perangkat daerah dapat meningkatkan penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya masing-masing.
 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
Melalui program ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika mampu melaksanakan Statistik sektoral di Kabupaten Merangin sehingga akan menghasilkan data yang akurat dan valid tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan data lainnya yang berhubungan dengan Kabupaten Merangin.
 4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Melalui program ini diharapkan semua perangkat daerah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah sehingga data yang dikirimkan dapat terlindungi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun anggaran.

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sehingga akan mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kebutuhan riil masyarakat (prosedur Baten Up).
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program - program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya

Secara rinci review terhadap Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2022 tampak pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Merangin

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	98 %	3.595.971.187	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	98 %	5.532.334.950	
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>		79.651.250	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>		104.150.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Renja dan renstra	8 Dok	19.015.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Renja dan renstra	8 Dok	21.015.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen RKA	2 Dok	19.145.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen RKA	2 Dok	29.146.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen DPA	2 Dok	19.572.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen DPA	2 Dok	30.616.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	6 Dok	21.918.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	6 Dok	23.372.800	

	SKPD					SKPD						
5	Admnsitrasi Keuangan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Administrasi Keuangan Daerah yang disediakan	12	Bulan	3.039.705.537	Admnsitrasi Keuangan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Administrasi Keuangan Daerah yang disediakan	12	Bulan	3.276.558.750
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2.846.275.537	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	3.026.433.750
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jasa Administrator Keuangan yang disediakan	12	Bulan	167.610.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jasa Administrator Keuangan yang disediakan	12	Bulan	217.200.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD	1	Dok	12.621.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran PD	1	Dok	17.725.500
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Makan dan Minum Harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang Disediakan	1	Dok	13.198.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Makan dan Minum Harian Pegawai/Rapat/Lembur/Tamu yang Disediakan	1	Dok	15.199.500
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				264.050.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				489.933.800
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat/Kelengkapan Listrik dan elektronik Perangkat Daerah yang disediakan	8	Jenis	6.001.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat/Kelengkapan Listrik dan elektronik Perangkat Daerah yang disediakan	8	Jenis	12.004.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan dan bahan Pembersih Kantor yang disediakan	30	Unit	34.011.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan dan bahan Pembersih Kantor yang disediakan	30	Unit	40.815.000

13	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Barang cetak dan Penggadaan Perangkat Daeah yang disediakan	8 Eks	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Barang cetak dan Penggadaan Perangkat Daeah yang disediakan	8 Eks	13.000.000	
14	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Frekuensi Perjalanan Dinas yang disediakan	99 Kali	215.038.800	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Frekuensi Perjalanan Dinas yang disediakan	99 Kali	424.114.800	
II	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Barang Milik daerah Urusan Penunjang pemerintah Daerah		19.948.500	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Barang Milik daerah Urusan Penunjang pemerintah Daerah		1.225.269.000	
1	Pengadaan Meubel	Dinas Komunikasi dan Informatika	Set Meubel yang disediakan	11 Unit	11.608.500	Pengadaan Meubel	Dinas Komunikasi dan Informatika	Set Meubel yang disediakan	11 Unit	76.640.000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perlengkapan gedung Kantor Perangkat Daerah yang disediakan	2 Unit	8.340.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perlengkapan gedung Kantor Perangkat Daerah yang disediakan	2 Unit	214.074.000	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		260.500.000	
						Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		460.500.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara		213.555.000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika			67.349.100	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika			82.924.600	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan	Surat Keluar Perangkat Daerah	250 Unit	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan	Surat Keluar Perangkat Daerah	250 Unit	2.000.000	

		Informatika						Informatika				
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	42.599.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	50.424.600
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan	64	Orang	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umu Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Makanan dan Minuman Pegawai yang disediakan	64	Orang	30.500.000
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				44.800.000
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika				44.800.000
7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				125.266.000	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika				128.698.500
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Dinas jabatan/Oeprasional perangkat daerah yang disediakan	2	Unit	87.870.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Dinas jabatan/Oeprasional perangkat daerah yang disediakan	2	Unit	90.270.000
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara	8	Unit	28.336.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah yang dipelihara	8	Unit	26.436.000
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	17	Unit	9.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	17	Unit	11.992.500

III	<i>Program Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>			2.235.513.300	<i>Program Informasi dan Komunikasi Publik</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>			2.946.688.450	
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				2.235.513.300	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				2.2946.688.450	
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Internet sehat	2 Kali	31.220.400	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Internet sehat	2 Kali	61.221.000	
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Media Komunikasi Publik yang dikelola	160 Media	2.107.106.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Media Komunikasi Publik yang dikelola	160 Media	2.370.005.950	
1	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pembantu yang dibentuk	56 Unit	45.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pembantu yang dibentuk	56 Unit	95.000.000	
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	5 Kim	52.186.900	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	5 Kim	420.461.500	
V	<i>Program Aplikasi Informatika</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>			279.154.100	<i>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>Program Aplikasi Informatika</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>		10.052.273.250	
	<i>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>			279.154.100		<i>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>		10.052.273.250	

1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPBE yang dikelola	1 Unit	39.855.900	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	SPBE yang dikelola	1 Unit	89.196.750	
2	Pengembangan aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi yang dikembangkan	2 Aplikasi	53.451.400	Pengembangan aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi yang dikembangkan	2 Aplikasi	228.450.600	
	Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Smart City yang dikelola	1 Unit	139.846.800					8.402.625.900	
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Menara Telekomunikasi yang diawasi	132 Unti	46.000.000	Penyusunan Laporan Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun	1 Dokumen	1.332.000.000	
VI	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		50.140.000	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	97 %	75.140.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan statistic sektoral yang diadakan		50.140.000					75.140.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Statistik Sektoral yang disusun	1 Dok	50.140.000	Penyusunan Renstra Strategis (Renstra) OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang disusun	0	75.140.000	
VII	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamana Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi		42.150.000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Komunikasi Publik	75 %	72.150.000	

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kab/Kota				42.150.000					72.150.000	
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	1 Unit	42.150.000	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	72.150.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain Program Nasional yang akan dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2024 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin terpilih tahun 2024 - 2026. Sesuai dengan tupoksinya Dinas komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan daerah di bidang statistik serta tugas pembantuan.

a. Tujuan

Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi

b. Sasaran

Sementara sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik

2. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Keamanan data dan informasi

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun 2020
1	2	3	4		5	6
1	Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang KOMINFO		Kurang Baik	Kurang Baik
		Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi dan Informasi	%	60	70
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	%	0	25
		Meningkatnya Keamanan data dan informasi	Persentase Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	%	0	10

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tahun) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kabupaten Merangin dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, maka program dan kegiatan yang disusun harus mengutamakan kepentingan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

A. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

B. Urusan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan

informatika dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sebagai salah satu OPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi Kepala Daerah.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 5 Program, 10 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 6.093.183.187,- dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM UTAMA

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program Informasi dan Komunikasi Publik, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Layanan Komunikasi Publik. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Konten Media Komunikasi Publik. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan pengelolaan internet sehat yang dapat disampaikan ke masyarakat dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan Jumlah Media Komunikasi Publik yang akan digunakan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

c. Pelayanan Informasi Publik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah PPID Pembantu yang dibentuk dan dibina. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbentuk dan terbinanya PPID Pembantu di setiap OPD.

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, Kemtiraan dan Komunitas

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk. Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menyediakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna memberikan informasi kepada masyarakat serta menyediakan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Program Aplikasi Informatika, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Aplikasi Informatika. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah SPBE yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan terkelolanya SPBE sehingga dapat memperlancar urusan pemerintah daerah.

b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Aplikasi yang dikembangkan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya Sistem Aplikasi yang selalu berkembang sehingga memudahkan dalam melakukan pengelolaan data dilingkungan pemerintahan Kabupaten Merangin maupun dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.

c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Smart City yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya sarana dan prasarana berbasis teknologi dan fasilitas-fasilitas berbasis teknologi ditempat-tempat umum sehingga akan memudahkan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi.

d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Menara Telekomunikasi yang diawasi. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terpeliharanya beberapa menara telekomunikasi di titik blank spot.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Data Sektoral Tersedia. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Statistik Sektoral yang disusun. Melalui kegiatan ini diharapkan akan tersedianya dokumen statistik sektoral tentang data pembangunan daerah kabupaten Merangin.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Program Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Program ini merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pada program ini terdapat beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Layanan Keamanan Informasi yang dikelola. Melalui kegiatan ini diharapkan terkelolanya layanan keamanan informasi yang mampu memberikan keamanan dan melindungi data-data yang ada pada perangkat daerah dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. PROGRAM PENUNJANG

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Melalui program ini diharapkan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

dengan baik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Meubel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Merangin

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i>									
2.16	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</i>									
2.16.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	<i>Nilai Evaluasi Akip SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>98 % BB Nilai</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>98 % BB Nilai</i>	<i>3.692.283.003</i>	<i>APBD</i>		<i>98 % BB Niali</i>	<i>3.866.128.663</i>
2.16.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai AKIP</i>	<i>77 (BB) %</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>72 % BB</i>	<i>42.500.000</i>	<i>APBD</i>		<i>75 % BB</i>	<i>46.500.000</i>
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dok	7.500.000	APBD		1 Dok	6.500.000
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dok	5.500.000	APBD		1 Dok	7.500.000

2.16.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD		1	Dok	6.500.000
2.16.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	4 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD		1	Dok	7.500.000
2.16.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	3 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD		1	Dok	5.500.000
2.16.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dok	7.500.000	APBD		3	Dok	7.500.000
2.16.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dok	5.500.000	APBD		2	Dok	5.500.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77 % (BB)	Dinas Komunikasi dan Informatika	72 %	BB	3.036.500.003	APBD		75 %	BB	3.042.500.663
2.16.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/ Bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	Orang/ Bulan	2.764.088.503	APBD		27	Orang/ Bulan	2.770.089.163
2.16.01.2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Dokumen	240.911.500	APBD		4	Dokumen	240.911.500

2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dok	10.500.000	APBD		2 Dok	10.500.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	11.000.000	APBD		2 Laporan	11.000.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	10.000.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77 % (BB)	Dinas Komunikasi dan Informatika	72 % BB	3.036.500.003	APBD		75 % BB	3.042.500.663
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dok	5.500.000	APBD		1 Dok	5.500.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	5.500.000	APBD		2 Laporan	5.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	47.500.000	APBD		94 %	51.345.000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156 Paket	Dinas Komunikasi dan Informatika	52 Paket	31.200.000	APBD		52 Paket	31.200.000

2.16.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Orang	16.300.000	APBD		2 Orang	20.145.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	220.500.000	APBD		94 %	240.500.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 Paket	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Paket	5.000.000	APBD		4 Paket	5.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Paket	7.500.000	APBD		4 Paket	7.500.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Paket	33.500.000	APBD		5 Paket	33.500.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	19 Paket	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Paket	9.500.000	APBD		4 Paket	9.500.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	165.000.000	APBD		6 Laporan	185.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	140.000.000	APBD		94 %	280.000.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	8 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Unit	40.000.000	APBD		0 Unit	-
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Jabatan yang diadakan	10 unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Unit	40.000.0000	APBD		1 Unit	260.000.000

2.16.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Unit	30.000.000	APBD		0	-	-
2.16.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	8 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Unit	30.000.000	APBD		1	Unit	20.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	94	%	66.283.000	APBD		94	%	66.283.000
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	Laporan	45.700.000	APBD		12	Laporan	45.700.000
2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Laporan	20.583.000	APBD		1	Laporan	20.583.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	94	%	128.000.000	APBD		94	%	128.000.000
2.16.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Unit	67.500.000	APBD		6	Unit	67.500.000
2.16.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Unit	35.000.000	APBD		6	Unit	35.000.000
2.16.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Unit	25.000.000	APBD		12	Unit	25.500.000

2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan Komunikasi Publik	87 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	87 %	3.103.834.000	APBD	87 %	3.259.026.435
2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan	Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	93 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	87 %	3.103.834.000	APBD	87 %	3.259.026.435
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	21 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Dok	105.000.375	APBD	5 Dok	115.000.375
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	2.814.208.625	APBD	2 Dok	2.939.399.625
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	35 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Dok	69.125.700	APBD	10 Dok	79.125.700
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan	24 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Dok	115.500.000	APBD	5 Dok	125.500.735
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Unsur-unsur SPBE	25 %		25 %	3.991.573.250		25 %	4.243.651.913
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	92 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	87 %	3.991.573.250		89 %	4.243.651.913
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	5 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dok	550.000.000	APBD	1 Dok	568.399.663

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik	13 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Unit	2.771.921.337	APBD		3 Unit	2.985.600.337
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	10 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dok	500.000.000	APBD		2 Dok	500.000.000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 DOK	169.651.913	APBD		1 Dok	189.651.913
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					100.140.000				155.147.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Tersedia	50 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	50 %	100.140.000	APBD		50 %	155.147.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral Tersedia	50 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	50 %	100.140.000	APBD		50 %	155.147.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	100.140.000	APBD		1 Dokumen	155.147.000
2.21	Urusan Pemerintah Bidang Persandian					97.150.000				102.000.500

2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3 OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 OPD	97.150.000			3 OPD	102.000.500
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	60 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	50 %	97.150.000			55 %	102.000.500
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	4 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokt	97.150.000			1 Dok	102.000.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Komunikasi Publik dengan target pada tahun 2023 sebesar 70%.
2. Persentase Pengelolaan Aplikasi informatika dengan target pada tahun 2023 sebesar 10%.
3. Persentase Data Sektoral Tersedia dengan target pada tahun 2023 sebesar 25%.
4. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah target pada tahun 2023 sebesar 10%.

4.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2024 tampak pada tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Merangin

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i>								
2.16	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</i>								
2.16.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</i>	<i>Nilai Evaluasi Akip SKPD Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>98 % BB Nilai</i>	<i>3.692.283.003</i>	<i>APBD</i>		<i>98 % BB Niali</i>	<i>3.866.128.663</i>
2.16.01.2.01	<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai AKIP</i>	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>72 % BB</i>	<i>42.500.000</i>	<i>APBD</i>		<i>75 % BB</i>	<i>46.500.000</i>
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dok	7.500.000	APBD		1 Dok	6.500.000

2.16.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD	1	Dok	7.500.000
2.16.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD	1	Dok	6.500.000
2.16.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Kooordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD	1	Dok	7.500.000
2.16.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD	1	Dok	5.500.000
2.16.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dok	7.500.000	APBD	3	Dok	7.500.000
2.16.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dok	5.500.000	APBD	2	Dok	5.500.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	72 %	BB	3.036.500.003	APBD	75 %	BB	3.042.500.663
2.16.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	Orang/ Bulan	2.764.088.503.	APBD	27	Orang/ Bulan	2.770.089.163

2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Dokumen	240.911.500	APBD		4	Dokumen	240.911.500
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Dok	10.500.000	APBD		2	Dok	10.500.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Laporan	11.000.000	APBD		2	Laporan	11.000.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Laporan	10.000.000	APBD		4	Laporan	10.000.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	72 %	BB	3.036.500.003	APBD		75 %	BB	3.042.500.663
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	5.500.000	APBD		1	Dok	5.500.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Laporan	5.500.000	APBD		2	Laporan	5.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	%	47.500.000	APBD		94 %	%	51.345.000
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	52	Paket	31.200.000	APBD		52	Paket	31.200.000

2.16.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Orang	16.300.000	APBD		2 Orang	20.145.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	220.500.000	APBD		94 %	240.500.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Paket	5.000.000	APBD		4 Paket	5.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Paket	7.500.000	APBD		4 Paket	7.500.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Paket	33.500.000	APBD		5 Paket	33.500.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Paket	9.500.000	APBD		4 Paket	9.500.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	165.000.000	APBD		6 Laporan	185.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 %	140.000.000	APBD		94 %	280.000.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Unit	40.000.000	APBD		0 Unit	-
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Jabatan yang diadakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	260.000.000

2.16.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Unit	30.000.000	APBD	0	-	-
2.16.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Unit	30.000.000	APBD	1	Unit	20.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	94	%	66.283.000	APBD	94	%	66.283.000
2.16.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	Laporan	45.700.000	APBD	12	Laporan	45.700.000
2.16.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Laporan	20.583.000	APBD	1	Laporan	20.583.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	94	%	128.000.000	APBD	94	%	128.000.000
2.16.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Unit	67.500.000	APBD	6	Unit	67.500.000
2.16.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Unit	35.000.000	APBD	6	Unit	35.000.000
2.16.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	Unit	25.000.000	APBD	12	Unit	25.500.000

2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	87	%	3.103.834.000	APBD		87	%	3.259.026.435
2.16.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan	Persentase Infomasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Dinas Komunikasi dan Informatika	87	%	3.103.834.000	APBD		87	%	3.259.026.435
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Dok	105.000.375	APBD		5	Dok	115.000.375
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dokumen	2.814.208.625	APBD		2	Dok	2.939.399.625
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	Dok	69.125.700	APBD		10	Dok	79.125.700
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program Atau Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Dok	115.500.000	APBD		5	Dok	125.500.735
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Unsur-unsur SPBE		25	%	3.991.573.250			25	%	4.243.651.913
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika	87	%	3.991.573.250			89	%	4.243.651.913
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dok	550.000.000	APBD		1	Dok	568.399.663

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	Unit	2.771.921.337	APBD	3	Unit	2.985.600.337
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	Dok	500.000.000	APBD	2	Dok	500.000.000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	DOK	169.651.913	APBD	1	Dok	189.651.913
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					100.140.000				155.147.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Tersedia	Dinas Komunikasi dan Informatika	50	%	100.140.000	APBD	50	%	155.147.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral Tersedia	Dinas Komunikasi dan Informatika	50	%	100.140.000	APBD	50	%	155.147.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dokumen	100.140.000	APBD	1	Dokumen	155.147.000
2.21	Urusan Pemerintah Bidang Persandian					97.150.000				102.000.500

2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	OPD	97.150.000			3	OPD	102.000.500
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	50	%	97.150.000			55	%	102.000.500
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Dokt	97.150.000			1	Dok	102.000.500
Total Keseluruhan						10.984.980.953					11.625.961.511

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan. Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya - upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan


disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

- b. Kaidah - kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 5 program, 12 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas - tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sudah mencakup semua program pembangunan bidang komunikasi dan informatika sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bangko, 20 Desember 2023

**KEPALA DINAS
KOMINFO KAB. MERANGIN**



Ir. M. ARIEF RH, MUM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690626 199303 1 005